



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 16 TAHUN 1981**

**TENTANG
LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bawa dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan di bidang Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dirasa perlu adanya data-data Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan pertimbangan Departemen Dalam Negeri dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/7/39-36 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- Untuk : 1. a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan secara periodik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I dan Tingkat II setiap Tahun Anggaran kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, sesuai dengan bentuk laporan sebagaimana terlampir.
 b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melaporkan secara periodik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan petunjuk tentang Tata Cara Pelaporan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada butir 1.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq Dinas Pendapatan Tingkat I mengkoordinasikan pelaporan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada butir 1.
4. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II cq Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan pelaporan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada butir 1.b.
5. Laporan tersebut pada butir 1.a. diterima Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dinistrusikan di : Jakarta.
Pada tanggal : 14 April 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 16 Tahun 1981

TANGGAL: 14 April 1981

1. Lampiran I a/Dpd I : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I.
2. Lampiran I b/Dpd I : Daftar Denda Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I.
3. Lampiran I c/Dpd I : Jumlah Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi Daerah Tingkat I.
4. Lampiran IIa/Dpd II : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.
5. Lampiran II b/Dpd II : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.
6. Lampiran II c/Dpd II : Daftar Denda Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
7. Lampiran II d/Dpd II : Rekapitulasi Denda Pajak dan Retribusi seluruh Daerah Tingkat II.
8. Lampiran II e/Dpd II : Jumlah Subyek dan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
9. Lampiran II f/Dpd II : Rekapitulasi jumlah Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi Daerah Tingkat II.

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
PROPIN SI TINGKAT I :**

No. Urt.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 19 / 19		Tunggakan s/d tahun ini	Keterangan
		Target	Realisasi		
I.	P A J A K .				
1.	Pajak Rumah Tangga.				
2.	Pajak Kend. Bermotor.				
3.	Bea Balik Nama Kend. Bermotor.				
4.	Opsen atas pajak kekayaan.				
5.	D. s. t.				
	J u m l a h (a)				
II.	RETRIBUSI.				
1.	Pemberian izin pengusahaan tambak-tambak ikan ditepi pantai.				
2.	Pemberian izin pengambilan pasir, batu, kerikil				
3.	Pemberian izin pengambilan dan pembakaran kapur gamping.				
4.	D. s. t.				
	J u m l a h (b)				
III.	BAGIAN LABA PER-USAHAAN DAERAH.				
1.	Perusahaan X				

2.	D. s. t. Jumlah (c)			
IV.	PENERIMAAN DINAS DINAS.			
1.	Dinas P U			
2.	Dinas Kesehatan			
3.	D. s. t. Jumlah (d)			
V.	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1.	Hasil Penjualan Milik Daerah.			
2.	D.s.t.			
	Jumlah (e)			
	Jumlah Seluruhnya :			

..... Tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPIN SI DATI. I

LAMPIRAN : I b/Dpd I

**DAFTAR DENDA : PAJAK DAN RETRIBUSI
PROP. DATI I**

NO.	JENIS PUNGUTAN	TAHUN FISCAL	KETERANGAN
I.	<u>PAJAK</u>		
1.	Pajak Rumah Tangga		
2.	D. s. t.		
	JUMLAH :		
II.	<u>RETRIBUSI</u>		
1.	Pemberian izin pengusaha-an tambak-tambak ikan di-tepi pantai		
2.	D. s. t.		
	JUMLAH :		

.....
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROP. DATI. I.**

(.....).-

**JUMLAH SUBYEK DAN OBYEK PAJAK/RETRIBUSI
PROPINSI DATI I**

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TAHUN FISCAL 19 ..		KETERANGAN
		SUBYEK	OBYEK	
	I. P A J A K.			
1.	Pajak Rumah Tangga			
2.	Pajak Kend. Bermotor			
3.	Bea Balik Nama Kend. Bermotor			
	II. RETRIBUSI.			
1.	Pemberian izin mengusa- hakan tambak-tambak ikan ditepi pantai.			
2.	Pemberian izin pengam- bilan pasir, batu dan ke- rikil			
3.	Pemberian izin pengam- bilan dan pembakaran kapur gamping			
4.	D. s. t.			

.....
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI**

(.....)

LAMPIRAN : II a/Dpd II

**TARGET REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI
KABUPATEN/KOTAMADYA DATI. II :
PROINSI DATI. I. :**

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 19 / 19		Tunggakan s/d 19	Keterangan
		Target	Realisasi		
I.	<u>PAJAK.</u>				
1.	Pajak Jalan				
2.	Pajak Potong Hewan				
3.	Pajak Pembangunan I				
4.	D. s. t.				
	J u m l a h (a)				
II.	<u>RETRIBUSI.</u>				
1.	Uang Leges				
2.	Uang Dispensasi				
3.	Uang Pangkalan				
4.	D. s. t.				
	J u m l a h (b)				
III.	<u>BAGIAN LABA PER- USAHAAN DAERAH</u>				
1.	Perusahaan X				
2.	D. s. t.				
	J u m l a h (c)				

IV.	PENERIMAAN DINAS			
	DINAS.			
1.	Dinas Kesehatan			
2.	D. s. t.			
	Jumlah (d)			
V.	PENERIMAAN LAIN-LAIN.			
1.	Hasil Penjualan milik Daerah.			
2.	D. s. t.			
	Jumlah (e)			
	Jumlah (a s/d e)			

..... TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTAMADYA DATI. II . . .

LAMPIRAN : IIb/Dpd II

**REKAPITULASI : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH SENDIRI SELURUH DATI. II
PROPINSI DATI. I. :**

No.	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran 19 / 19		Tunggakan s/d 19	Keterangan
		Target	Realisasi		
I.	<u>PAJAK.</u>				
1.	Pajak Jalan				
2.	Pajak Potong Hewan				
3.	Pajak Pembangunan I				
4.	D. s. t.				
	J u m l a h (a)				
II.	<u>RETRIBUSI.</u>				
1.	Uang Leges				
2.	Uang Dispensasi Ja- lan/Jembatan				
3.	Uang Pangkalan				
4.	D. s. t.				
	J u m l a h (b)				
III.	<u>BAGIAN LABA PER- USAHAAN DAERAH</u>				
1.	Perusahaan X				
2.	D. s. t.				
	J u m l a h (c)				
IV.	<u>PENERIMAAN DINAS- DINAS.</u>				

1.	Dinas Kesehatan			
2.	D. s. t.			
	J u m l a h (d)			
V.	<u>PENERIMAAN LAIN-LAIN.</u>			
1.	Hasil Penjualan milik Daerah.			
2.	D. s. t.			
	J u m l a h (e)			
	Jumlah (a s/d e)			

..... TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROP. DATI. I :

LAMPIRAN : II c/Dpd II

DAFTAR DENDA PAJAK DAN RETRIBUSI
KABUPATEN DATI II :
PROPINSI DATI . I :

NO.	JENIS PUNGUTAN	TAHUN FISCAL	KETERANGAN
I.	<u>PAJAK.</u>		
1.	Pajak Jalan		
2.	D. s. t.		
II.	<u>RETRIBUSI.</u>		
1.	Uang dispensasi jalan/jembatan		
2.	D. s. t.		

.....
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KAB/KODYA DATI II

(.....)

LAMPIRAN : II d/Dpd II

REKAPITULASI DENDA PAJAK DAN RETRIBUSI
SELURUH DAERAH TINGKAT II.
PROPINSI DATI I

NO.	JENIS PUNGUTAN	TAHUN FISCAL	KETERANGAN
.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROP. DATI I

(.....)

LAMPIRAN : II e/Dpd II

JUMLAH SUBYEK DAN OBYEK PAJAK/RETRIBUSI
KAB./KODYA DATI. II :
PROPINSI DATI. I. :

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TAHUN FISCAL 19 ..		KETERANGAN
		SUBYEK	OBYEK	
I.	<u>P A J A K .</u>			
1.	Pajak Jalan			
2.	Pajak Potong Hewan			
3.	Pajak Pembangunan I			
4.	Pajak Radio			
5.	Pajak Bangsa Asing			
6.	D. s. t.			
II.	<u>RETRIBUSI.</u>			
1.	Uang Leges			
2.	Uang Dispensasi Jalan/ Jembatan			
3.	Uang Pangkalan			
4.	Uang Penambangan			
5.	Uang Pemeriksaan/Pemban- taian.			
6.	D. s. t.			

..... TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KAB./KODYA DATI. II

**REKAPITULASI : JUMLAH SUBYEK DAN OBYEK PAJAK/
RETRIBUSI SELURUH DATI II
PROPINSI DATI I :**

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TAHUN FISCAL 19 ..		KETERANGAN
		SUBYEK	OBYEK	
I.	<u>P A J A K.</u>			
1.	Pajak Jalan			
2.	Pajak Potong Hewan			
3.	Pajak Pembangunan I			
4.	Pajak Radio			
5.	Pajak Bangsa Asing			
6.	D. s. t.			
II.	<u>RETRIBUSI.</u>			
1.	Uang Leges			
2.	Uang Dispensasi Jalan/ Jembatan			
3.	Uang Pangkalan			
4.	Uang Penambangan			
5.	Uang Pemeriksaan/Pemban- taian.			
6.	D. s. t.			

.....
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DATI I**

(.....)

THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES AND THE STATE OF MASSACHUSETTS

ARTICLE I
SECTION 1
THE LIBERTIES OF THE SUBJECT

SECTION 2
THE FREEDOM OF THE PRESS

SECTION 3
THE FREEDOM OF ASSEMBLY

SECTION 4
THE FREEDOM OF PETITION

SECTION 5
THE FREEDOM OF RELIGION

SECTION 6
THE FREEDOM OF PROPERTY

SECTION 7
THE FREEDOM OF PERSON

SECTION 8
THE FREEDOM OF TRADE

SECTION 9
THE FREEDOM OF CONTRACT

SECTION 10
THE FREEDOM OF INHERITANCE

SECTION 11
THE FREEDOM OF MARRIAGE

SECTION 12
THE FREEDOM OF EDUCATION

SECTION 13
THE FREEDOM OF PRACTICE

SECTION 14
THE FREEDOM OF HABITATION

SECTION 15
THE FREEDOM OF VOTING

SECTION 16
THE FREEDOM OF EXPRESSION

SECTION 17
THE FREEDOM OF ASSEMBLY

SECTION 18
THE FREEDOM OF PETITION

SECTION 19
THE FREEDOM OF PROPERTY

SECTION 20
THE FREEDOM OF CONTRACT

SECTION 21
THE FREEDOM OF INHERITANCE